

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem perekonomian yang dianut di Indonesia adalah sistem perekonomian kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana usahanya dilakukan oleh rakyat secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Didalam sistem ekonomi kerakyatan dikenal tiga pelaku ekonomi yang menjadi pilar utama perekonomian di Indonesia yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Salah satu badan usaha yang mempunyai peran strategis sebagai sarana penunjang kegiatan pembangunan nasional adalah koperasi, dimana koperasi merupakan badan usaha atau badan hukum yang beranggotakan perseorangan dan dijalankan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan dengan berlandaskan azas kekeluargaan. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 25 1992 Tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”**

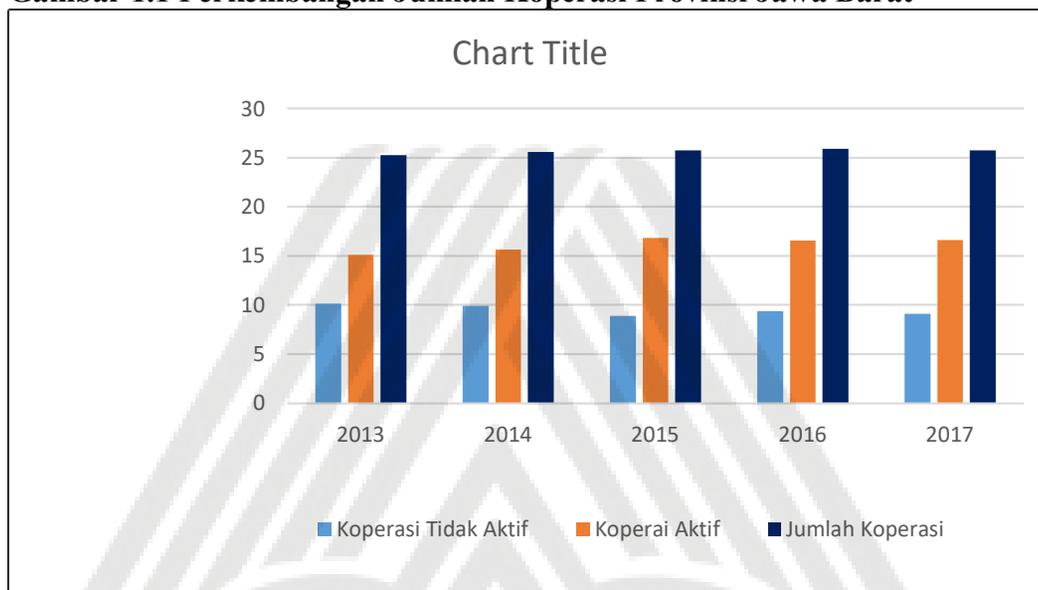
Pengertian tersebut menyatakan bahwa pada hakekatnya koperasi Indonesia adalah organisasi yang merupakan perseorangan yang melakukan kerjasama ekonomi serta gotong-royong berdasarkan persamaan yang mana hal tersebut

dilakukan untuk kepentingan bersama anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut akan kita dapatkan di koperasi karena koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang kegiatannya adalah untuk mensejahterakan serta untuk memperjuangkan dan meningkatkan taraf hidup orang banyak khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sama dengan tujuan dan cita-cita pembangunan nasional secara keseluruhan. Pengembangan koperasi menurut Nasution (2008:25) yaitu:

**“Pengembangan koperasi dapat dijadikan sebagai sebuah wahana yang efektif bagi anggota untuk saling bekerjasama, membuka akses pasar, modal, informasi, teknologi dengan mengoptimalkan potensi, dan memanfaatkan peluang usaha yang terbuka”.**

Pengembangan koperasi di Indonesia di dasarkan atas kebutuhan masyarakat Indonesia, dimana koperasi menjadi salah satu soko guru perekonomian di Indonesia. Dalam menunjang program pengembangan koperasi harus mempersiapkan segalanya baik itu yang menyangkut organisasinya maupun manajemennya. Manajemen memerlukan berbagai informasi yang berasal dari anggota, khususnya informasi tentang kebutuhan dan kepentingan anggota. Informasi ini mungkin hanya diperoleh jika partisipasi dalam koperasi berjalan dengan baik. Manajemen yang baik diharapkan mampu menciptakan koperasi menuju pencapaian yang sehat dan berkembang.

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang *market share* yang relatif besar untuk produk-produk unggulan dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan perkembangan perkoprasiaannya dilansir dari sensus ekonomi 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

**Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Koperasi Provinsi Jawa Barat**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat (2018) diolah*

Pada gambar 1.1 jumlah koperasi yang aktif di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Selain itu terjadi penurunan koperasi tidak aktif dari tahun 2013 ke tahun 2015 namun juga terjadi peningkatan pada tahun 2015 ke tahun 2017. Rata-rata peningkatan koperasi yang aktif lebih besar daripada peningkatan koperasi yang tidak aktif. Koperasi yang aktif memiliki kenaikan dengan persentase yang lebih tinggi bahkan dua kali lipatnya dari persentase kenaikan koperasi tidak aktif.

Pembangunan nasional melalui koperasi tidak hanya kepada tingkat nasional, provinsi, maupun kota-kota besar tetapi pembangunan koperasi juga harus dilakukan pada tingkat pedesaan. Seperti pendapat Arifinal Chaniago dalam (Widayanti, 2005:25) mengenai KUD yaitu:

**“Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan**

**ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri”.**

Koperasi harus menjadi wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada masyarakat agar perekonomian tingkat pedesaan bisa meningkat. Salah satu jenis koperasi pedesaan adalah Koperasi Unit Desa.

Provinsi Jawa barat dengan potensi dan keunggulannya memiliki jumlah KUD yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat sebanyak 672 KUD. Yang mana diantaranya 670 KUD primer dan 2 KUD sekunder. Bandung merupakan salah satu daerah yang memiliki sebesar 79 KUD tingkat primer yang tersebar di Kabupaten/Kota Bandung. Berikut ini merupakan data Koperasi Unit Desa aktif di Kabupaten/Kota Bandung.

**Tabel 1.1 Koperasi Unit Desa Tingkat Primer Menurut Kabupaten/Kota Bandung**

Kabupaten/Kota	Koperasi	
	Koperasi Unit Desa	Koperasi non KUD
Kabupaten Bandung	43	1.674
Kabupaten Bandung Barat	31	842
Kota Bandung	5	2.519

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat (2018) diolah*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki jumlah KUD yang lebih banyak dibanding dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung. Tingkat persentase koperasi aktif dari Kabupaten Bandung adalah sebesar 51%, tingkat persentase koperasi aktif Kabupaten Bandung Barat sebesar 46% dan untuk Kota Bandung untuk koperasi aktif sebesar 84%.

Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka merupakan koperasi primer dan merupakan salah satu KUD yang berada di kabupaten Bandung. KUD Shinta

Cicalengka merupakan koperasi produsen dan merupakan *multi purpose* yang didirikan atas dasar kesamaan kebutuhan para anggotanya. Koperasi ini memiliki 3 unit usaha, yaitu:

1. Unit Simpan dan Unit Pinjam, yaitu unit yang melayani kegiatan menyimpan dan meminjam untuk para anggota.
2. Unit Jasa, yaitu pelayanan pembayaran rekening listrik.
3. Unit Perdagangan, yaitu unit yang memberikan pelayanan khususnya kepada anggota dan pada masyarakat pada umumnya, dalam hal ini yaitu kegiatan penjualan atau pembelian barang baik secara tunai maupun kredit sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Semua unit usaha ini merupakan bentuk pelayanan koperasi kepada anggotanya sesuai dengan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun perkembangan anggota Koperasi Unit Desa Shinta selama lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Unit Desa Shinta Cicalengka Tahun 2014-2018**

Tahun	Anggota Awal (orang)	Anggota Masuk (orang)	Anggota Keluar (orang)	Total Anggota (orang)
2014	4776	25	21	4780
2015	4780	13	22	4771
2016	4771	36	35	4772
2017	4772	20	21	4771
2018	4771	15	11	4775
Rata-rata	4774	22	22	4774

*Sumber: Laporan RAT KUD Shinta Cicalengka Tahun 2014-2018 (diolah)*

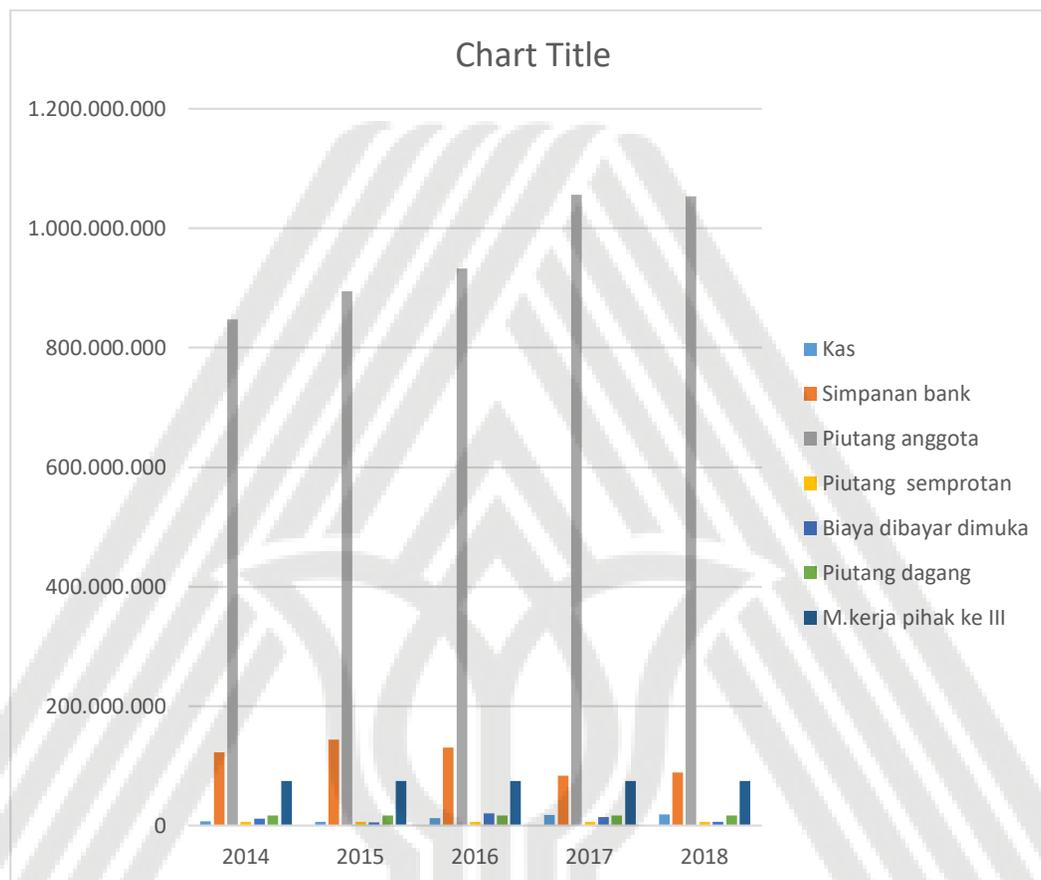
Berdasarkan tabel diatas maka rata-rata jumlah anggota koperasi selama periode 2014 sampai dengan 2017 adalah sebanyak 4774 anggota (orang). Dengan

rata-rata anggota masuk sebanyak 22 orang dan anggota keluar sebanyak 22 orang. Penyebab adanya anggota yang keluar diakibatkan oleh anggota yang berpindah tempat serta meninggal dunia.

Untuk mencapai tujuan dan pelayanan yang baik kepada anggota maka dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terarah. Perencanaan merupakan dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, maka dari ini KUD Shinta Cicalengka harus tepat dalam merencanakan kegiatan usaha yang akan dijalankannya. Setiap kegiatan usaha biasanya akan selalu membutuhkan dana untuk modal yang akan digunakan untuk membelanjakan usahanya, maka dari itu dibutuhkan manajemen keuangan yang baik dalam hal ini perencanaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengaturan aktivitas atau kegiatannya.

KUD Shinta Cicalengka harus dapat mengatur sumber dan penggunaan dana secara tepat dan sesuai dengan prinsip pembiayaan yang benar. Aset menjadi komponen penting dalam menjalankan setiap jenis usaha selain itu juga aset merupakan segala sumber daya dan harta yang dimiliki koperasi untuk digunakan dalam operasionalnya. Aset terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, aktiva lain-lain. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan koperasi dalam upaya menjaga kelangsungan usahanya adalah melalui pengaturan keuangan dalam aktiva lancar.

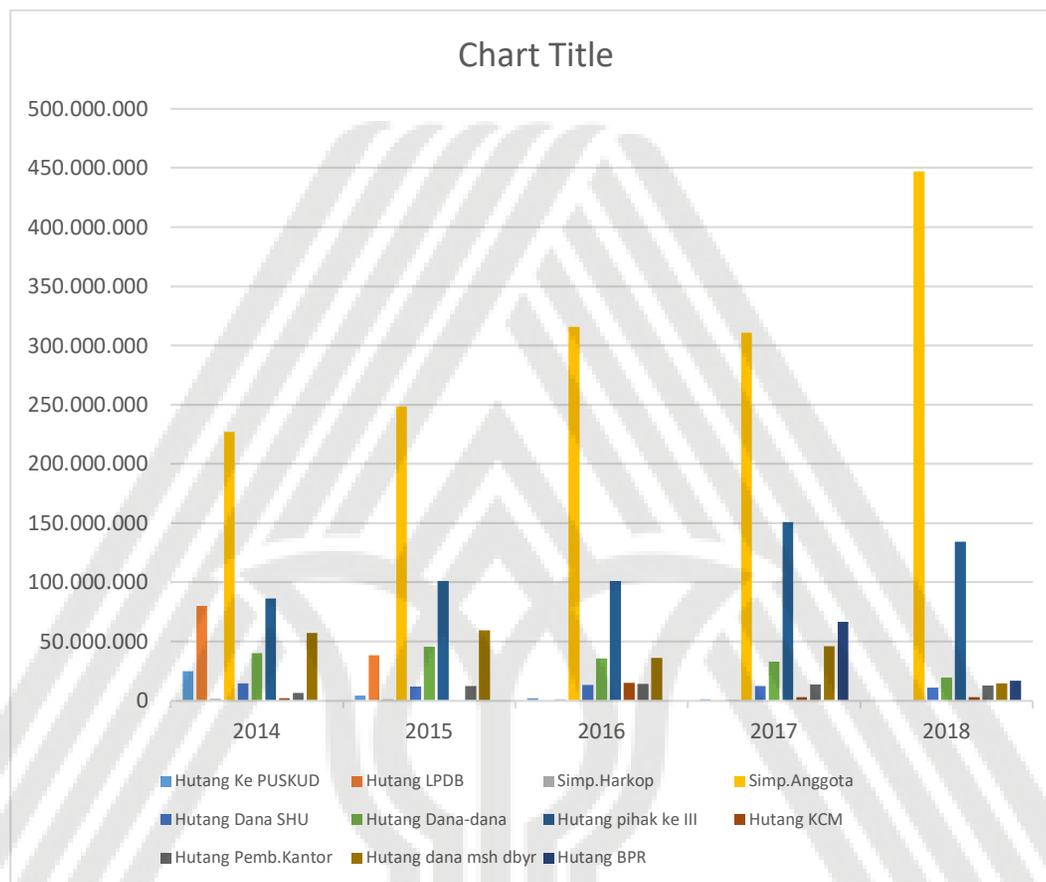
**Gambar 1.2 Grafik perkembangan Aktiva Lancar KUD Shinta Cicalengka**



*Sumber: Laporan Keuangan RAT KUD Shinta Cicalengka Tahun 2014-2018*

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa salah satu komponen aktiva lancar yang selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kenaikan tersebut terjadi pada piutang anggota dan kas, sementara terjadi penurunan pada simpanan bank karena terjadi penarikan uang dari bank untuk dialokasikan ke piutang anggota. Untuk M.kerja pihak ke III, piutang dagang, dana piutang semprotan jumlahnya selalu tetap. Sementara itu untuk biaya dibayar dimuka fluktuatif setiap tahunnya.

**Gambar 1.3 Grafik perkembangan Hutang Lancar KUD Shinta Cicalengka**



*Sumber: Laporan Keuangan RAT KUD Shinta Cicalengka Tahun 2014-2018*

Berdasarkan gambar 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa salah satu komponen aktiva lancar yang selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kenaikan tersebut terjadi pada piutang anggota dan kas, sementara terjadi penurunan pada simpanan bank karena terjadi penarikan uang dari bank untuk dialokasikan ke piutang anggota. Untuk M.kerja pihak ke III, piutang dagang, dana piutang semprotan jumlahnya selalu tetap. Sementara itu untuk biaya dibayar dimuka fluktuatif setiap tahunnya.

**Tabel 1.3 Aset Lancar, Kewajiban/Hutang Lancar KUD Shinta Cicalengka periode 2014 sampai dengan 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Aktiva Lancar</b>	<b>N/T (%)</b>	<b>Hutang Lancar</b>	<b>N/T (%)</b>
2014	Rp899.777.974		Rp539.635.116	
2015	Rp924.915.203	0,028	Rp522.100.949	(0,032)
2016	Rp952.451.184	0,030	Rp534.333.375	0,023
2017	Rp899.764.192	(0,055)	Rp638.119.353	0,194
2018	Rp898.687.651	(0,001)	Rp659.271.382	0,033
<b>Rata-rata</b>	Rp915.119.241		Rp578.692.035	
<b>Maksimal</b>	Rp952.451.184		Rp659.271.382	
<b>Minimal</b>	Rp898.687.651		Rp522.100.949	

*Sumber: Laporan Keuangan RAT KUD Shinta Cicalengka Tahun 2013-2017*

Pada tabel 1.3 memberikan informasi mengenai nilai aset lancar dan hutang lancar yang dimiliki KUD Shinta Cicalengka. Pada table 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata aktiva lancar yaitu sebesar Rp 915.119.241 dengan nilai aktiva lancar tertinggi yaitu sebesar Rp 952.451.184 ditahun 2016 dan nilai terkecil yaitu Rp 898.687.651 ditahun 2018. Sementara untuk nilai rata-rata hutang lancar yaitu sebesar Rp 578.692.035 dengan nilai terbesar Rp 659.271.382 dan nilai terkecil yaitu Rp 522.100.949.

Perlunya manajemen yang baik dalam hal ini perencanaan anggaran bagi koperasi agar mampu mengoptimalkan aset lancar dan hutang lancar secara baik dan benar. Pengelolaan kas merupakan hal yang penting yang perlu dilakukan koperasi karena kas merupakan aset lancar yang paling likuid dan yang paling cepat mengalami perubahan dalam suatu koperasi maupun perusahaan. Kas merupakan aset lancar yang paling rentang terhadap penyimpangan-penyimpangan dan merupakan salah satu faktor dalam memperlancar aktivitas operasional koperasi. Untuk mengelola kas yang baik maka dibutuhkan perencanaan anggaran yang baik

pula. Dalam pengelolaannya, perencanaan adalah yang paling tepat karena perencanaan anggaran kas merupakan sistem pengelolaan koperasi yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas koperasi. Manajer koperasi harus mampu mengelola uang yang masuk ke koperasi dan juga uang yang keluar dari koperasi.

Kas berputar setiap harinya, dari perputaran kas tersebut diharapkan dapat melunasi hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Hasil kas merupakan dana atau aset yang digunakan untuk menjamin atau membayar pinjaman, membayar biaya bunga, dan membiayai operasi sehari-hari. Seperti membayar upah buruh, gaji pegawai dan lain sebagainya. Hal tersebut akan mempengaruhi likuiditas KUD Shinta Cicalengka.

**Tabel 1.4 Cash Flow KUD Shinta Cicalengka periode 2014 – 2018**

Tahun	Saldo Awal	Cash In Flow	Cash Out Flow	Net Cash Flow	N/T
2014	Rp 24.128.318	Rp 49.679.452	Rp 66.281.466	Rp 7.526.304	
2015	Rp 7.526.304	Rp 42.671.363	Rp 43.226.585	Rp 6.971.082	(7%)
2016	Rp 6.971.082	Rp 31.372.543	Rp 25.750.255	Rp 12.593.370	81%
2017	Rp 12.593.370	Rp 170.216.748	Rp 164.450.563	Rp 18.359.555	46%
2018	Rp 18.359.555	Rp 23.196.415	Rp 22.228.570	Rp 19.327.400	5%

Sumber : Laporan RAT KUD Shinta Cicalengka 2013 – 2017

Berdasarkan tabel 1.4 *cash flow* diatas dapat dilihat perkembangan kas yang terdapat di KUD Shinta Cicalengka bahwa ditahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sampai 7%, sedangkan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi dari tahun 2014 ke tahun 2015 mencapai 81%.

**Tabel 1.5 Perhitungan *Current Ratio* dan *Cash Ratio* KUD Shinta Cicalengka Tahun 2014-2018**

No	Rasio	Tahun	Nilai	Kriteria
1	<i>Current Ratio</i>	2014	145%	kurang baik
		2015	149%	kurang baik
		2016	150%	Cukup baik
		2017	141%	kurang baik
		2018	136%	kurang baik
2	<i>Cash Ratio</i>	2014	24%	Buruk
		2015	29%	Buruk
		2016	27%	Buruk
		2017	16%	Buruk
		2018	17%	Buruk

Sumber: pengolahan laporan RAT KUD Shinta Cicalengka tahun 2014 – 2018.

#### 1.6 Tabel Standar Penilaian Rasio

No	Rasio Likuiditas	Standar	Kriteria
1	Current ratio	200% s/d 250%	Sangat Baik
		175% s/d <200% atau >250% s/d 275%	Baik
		150% s/d <175% atau >275% s/d 300%	cukup Baik
		125% s/d <159% atau >300% s/d 325%	Kurang Baik
		<125% atau >325%	Sangat Kurang
2	Cash Ratio	> 200%	Sangat Baik
		175% s/d 200%	Baik
		150% s/d 174%	Cukup Baik
		125% s/d 149%	Kurang Baik
		<125%	Buruk

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi Berprestasi.

Berdasarkan table 1.5 dapat dilihat bahwa tingkat likuiditas KUD Shinta menggunakan *current ratio* untuk ditahun 2014 sampai dengan tahun 2015 termasuk kriteria kurang baik dimana aktiva lancar yang dimiliki koperasi belum mampu menjamin hutang lancar yang segera jatuh tempo, untuk tahun 2016

termasuk dalam kriteria cukup baik dimana total aktiva lancar sudah cukup memadai dalam menjamin hutang lancarnya, dan untuk tahun 2017 sampai dengan 2018 termasuk dalam kriteria kurang baik dimana total aktiva lancar belum mampu dalam menjamin hutang lancarnya. Sementara itu untuk keadaan *cash ratio* selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2018 termasuk kedalam kriteria buruk, kondisi tersebut diakibatkan oleh ketidak mampuan jumlah kas yang dimiliki koperasi dalam menjamin hutang lancar yang segera jatuh tempo. Maka dalam hal ini perencanaan anggaran kas sangatlah penting untuk mengatasi jumlah uang yang tidak mencukupi selain itu juga sangat penting untuk mengukur tingkat likuiditas koperasi.

Berdasarkan uraian diatas mengenai laporan keuangan KUD SHINTA CICALENGKA penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian “**Analisis Anggaran Kas Dalam Upaya Meningkatkan Likuiditas**”.

## **1.2 Identifikas Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian diatas, maka peneliti menguraikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Anggaran kas pada koperasi KUD Shinta Cicalengka.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi likuiditas.
3. Upaya yang dilakukan KUD “Shinta” Cicalengka untuk meningkatkan likuiditas.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas maka peneliti mempunyai maksud dan tujuan penelitian yaitu:

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perencanaan manajemen kas dalam upaya meningkatkan likuiditas Koperasi Unit Desa Shinta Cicalengka .

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Anggaran kas yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Shinta Cicalengka.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi likuiditas.
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan likuiditas.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi mengenai manajemen keuangan khususnya yang berhubungan dengan konsep manajemen kas yang kaitannya dengan likuiditas.

#### **1.4.1 Aspek Teoritis**

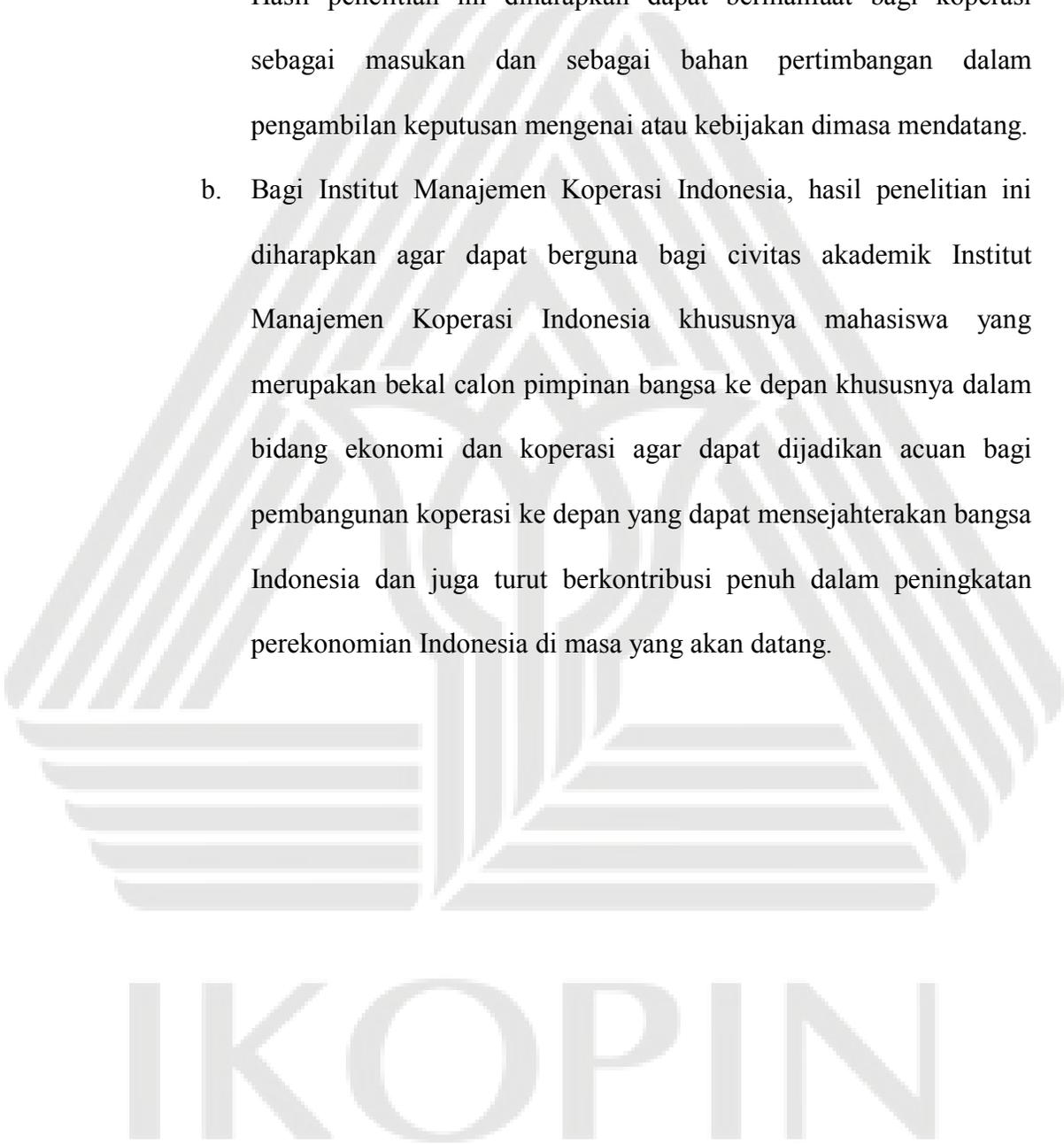
- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan aspek pengembangan keilmuan dalam bidang manajemen keuangan dan dapat bermanfaat bagi ilmu manajemen koperasi.
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi penelitian dimasa mendatang.

### 1.4.2 Aspek Praktis

a. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi sebagai masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai atau kebijakan dimasa mendatang.

- b. Bagi Institut Manajemen Koperasi Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat berguna bagi civitas akademik Institut Manajemen Koperasi Indonesia khususnya mahasiswa yang merupakan bekal calon pimpinan bangsa ke depan khususnya dalam bidang ekonomi dan koperasi agar dapat dijadikan acuan bagi pembangunan koperasi ke depan yang dapat mensejahterakan bangsa Indonesia dan juga turut berkontribusi penuh dalam peningkatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.



IKOPIN